

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abhan, *et al.* 2018. Laporan Kinerja 2018 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan Menguatkan Pengawasan. Bawaslu RI. Jakarta.

Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

Ahmad Fikri Hadin. 2013. Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Genta Press. Yogyakarta.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana. Jakarta.

Franz Magnis-Suseno. 1987. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Henry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press. New York.

I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2018. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Jakarta.

-----, 2006. Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Ind. Hill Co. Jakarta.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. Jakarta.

-----, 1987. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Eresco. Bandung.

Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta



Mulyana W. Kusuma, *et al.* 2000. Menata Politik Pasca Reformasi. KIPP Indonesia. Jakarta.

Ni'matul Huda, Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. Kencana. Jakarta.

Ni'matul Huda. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Rajawali Pers. Depok.

----- . 2015. Ilmu Negara. Rajawali Pers. Jakarta.

Parulian Donald. 1997. Menggugat Pemilu. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Philipus Mandiri Hadjon, *et al.* 2008. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Prayudi, Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.

Ramlan Surbakti, Kris Nugroho. 2015. Studi Tentang Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.

Saldi Isra, Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis (Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia)*. Rajawali Pers. Depok.

Syamsuddin Haris et al. 2014. Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019. Electoral Research Institute & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani. 2012. Hukum Konstitusi. Pustaka Setia. Bandung.

Jurnal

Achmad Arifulloh. 2015. Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2 No. 2.

Benny Geys. 2006. Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research. Electoral Studies Volume 25 Issue 4.

Sanur. 2019. Persiapan Pilkada Serentak 2020. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Volume 11 Nomor 24.



Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, Untung Dwi Hananto. 2019. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 1.

Gotfridus Goris Seran. 2019. Konstitusionalitas dan Desain Pemilu Lada Langsung Serentak Nasional. Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 3.

Ni'matul Huda, Sri Hastuti Puspitasari. 2012. Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah. Jurnal Hukum Lus Quia Iustum Volume 19 Nomor 3.

Soerya Respationo. 2013. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Elektoral. Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Nomor 3.

Yusdianto. 2010. Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Lain lain

Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010

